

Pj Gubernur Sultra Pantau Gladi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih di Jakarta

Jakarta, sultranet.com - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., terus memantau tahapan persiapan pelantikan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua, bersama 16 Bupati dan Wali Kota se-Sultra di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025. (18/2)

“Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan dilaksanakan secara serentak oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 20 Februari, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang tata cara pelantikan kepala dan wakil kepala daerah,” ujar Pj Gubernur, Selasa (18/2/2025).

Sekda Sultra menambahkan bahwa sebelum pelantikan, para kepala daerah terpilih menjalani berbagai tahapan persiapan. Setelah pemeriksaan kesehatan, Selasa (18/2/2025) mereka mengikuti gladi kotor di sekitar Lapangan Monas, Jakarta.

“Hari ini gladi pertama dilakukan dengan pakaian olahraga sejak pagi hingga selesai. Para kepala daerah dari Sultra berangkat bersama dari satu hotel menuju lokasi menggunakan tiga bus. Gladi ini mencakup pembentukan pleton, penghormatan, dan peraturan baris-berbaris. Meski terdengar sederhana, persiapan ini penting karena peserta pelantikan cukup banyak,” jelasnya.

Gladi resik dijadwalkan pada Rabu (19/2/2025), sebelum pelantikan keesokan harinya. Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah dan wakilnya akan mengikuti orientasi di Magelang.

“Kami berharap semua kepala daerah terpilih tetap dalam kondisi prima dan pelantikan berjalan lancar. Semoga mereka kembali ke Sultra tanpa kendala,” kata Sekda Sultra.

Selain Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, berikut 16 Bupati/Wali Kota serta Wakil Bupati/Wakil Wali Kota terpilih yang akan dilantik:

- Kolaka: H. Amri, S.STP., M.Si dan H. Husmaluddin
- Konawe: H. Yusran Akbar, S.T. dan H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si
- Bombana: Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si
- Buton Utara: Afirudin Mathara, S.H., M.H dan Rahman, S.KM., M.Kes
- Kolaka Timur: Abd. Azis, S.H., M.H dan Yosep Sahaka, S.Pd
- Muna Barat: La Ode Darwin dan Drs. Ali Basa, M.S.
- Konawe Selatan: Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H.
- Muna: Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, S.H., M.H
- Buton: Alvin Akawijaya Putra, S.H dan Syarifudin Saafa, S.T.
- Buton Selatan: Muhammad Adios, S.Sos dan La Ode Risawal, S.H
- Wakatobi: H. Haliana, S.E dan Dra. Hj. Safia Wualo
- Kolaka Utara: Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H dan H. Jumarding, S.E.
- Konawe Utara: H. Ikbar, S.H., M.H dan H. Abu Haera, S.Sos., M.Si
- Konawe Kepulauan: Rifqi Saifullah Razak, S.T dan Muhamad Farid, S.E
- Kota Kendari: dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM dan Sudirman
- Kota Baubau: H. Yusran Fahim, S.E dan Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc.

Pelantikan ini menjadi momen penting dalam transisi pemerintahan di Sulawesi Tenggara, menandai dimulainya masa jabatan baru bagi kepala daerah hasil Pilkada 2024.

Tags:

Frasa kunci:

Topik:

Pj Gubernur Sultra Minta OJK

Perkuat Literasi Keuangan dan Lindungi Masyarakat dari Pinjol Ilegal

Kendari, sultranet.com - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat literasi keuangan dan melindungi masyarakat dari investasi serta pinjaman online ilegal. Hal ini ia sampaikan dalam acara pengukuhan Kepala OJK Provinsi Sultra yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa (18/02/2025).

Andap menyampaikan selamat kepada Bismi Maulana Nugraha yang resmi menjabat sebagai Kepala OJK Provinsi Sultra, menggantikan Arjaya Dwi Raya. Ia juga mengapresiasi dedikasi Arjaya selama lima tahun terakhir.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Sultra, kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan. Semoga sukses di tempat yang baru,” ujar Andap.

Dalam sambutannya, Andap menekankan pentingnya sinergi antara OJK dan pemerintah daerah untuk memperkuat sektor keuangan di Sultra. Ia mengingatkan agar OJK tidak hanya berperan dalam pengawasan, tetapi juga berkontribusi nyata dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

“Kami berharap OJK lebih aktif dalam edukasi keuangan agar masyarakat terhindar dari investasi ilegal dan pinjaman online yang merugikan,” kata Andap.

Ia juga menyoroti perlunya integrasi digital dalam sistem keuangan daerah serta pengawasan ketat terhadap industri jasa keuangan demi menjaga stabilitas sektor riil, termasuk UMKM.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan bahwa OJK memiliki tugas tambahan dalam mengembangkan sektor jasa keuangan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi, tetapi juga harus menguatkan dan mengembangkan sektor keuangan. Sinergi antara OJK dan pemerintah daerah

sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujar Mahendra.

Mahendra juga mengapresiasi pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Sultra, yang terdiri dari satu TPAKD tingkat provinsi dan 17 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Ia menilai langkah ini dapat mempercepat inklusi keuangan dan mendukung sektor UMKM.

Di akhir acara, Andap menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kerja OJK serta melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal.

“Kami akan terus bersinergi dengan OJK dalam upaya perlindungan masyarakat serta pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah,” tutupnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Forkopimda Sultra, Sekretaris Daerah, pejabat OJK pusat dan daerah, pimpinan BI, serta perwakilan BUMN dan BUMD di Sultra.

Bentengi Anak di Dunia Digital, Regulasi Baru Segera Diumumkan

Jakarta, sultranet.com - Di tengah pesatnya arus digitalisasi dan semakin kompleksnya ancaman siber, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus memperkuat komitmennya untuk melindungi anak-anak di ruang digital melalui penyusunan regulasi baru. Dalam rangka memperingati Safer Internet Month, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan tata kelola perlindungan anak yang lebih komprehensif, guna memastikan keamanan dan kenyamanan generasi muda dalam mengakses dunia maya. Langkah ini merupakan respons terhadap peningkatan pengguna internet yang mencapai 221 juta orang di Indonesia, dengan sekitar 9,17 persen di antaranya berusia di bawah 12 tahun, serta meningkatnya risiko konten judi online dan pornografi. Jakarta, 18 Februari 2025

Pemerintah telah mengupayakan penertiban konten berbahaya, seperti penghapusan 993.114 konten judi online dari 20 Oktober 2024 hingga 15 Februari 2025, selain ratusan ribu konten pornografi. Namun, Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa tindakan tersebut hanyalah sebagian dari upaya menyeluruh untuk melindungi anak-anak. Regulasi baru yang sedang disusun akan memperkuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui tata kelola perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Upaya ini diharapkan dapat mengantisipasi ancaman siber yang semakin kompleks serta menciptakan ekosistem digital yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan anak-anak.

Pentingnya membangun budaya sadar perlindungan data dan keamanan siber menjadi fokus utama dalam strategi pemerintah. Pendekatan *data protection by design and by default* akan diterapkan di setiap sistem digital agar aspek keamanan tidak hanya dianggap formalitas, melainkan menjadi pondasi utama dalam setiap inovasi teknologi. Meutya Hafid menilai, peningkatan indeks keselamatan anak secara online, yang menunjukkan kemajuan signifikan Indonesia di kuartil kedua Child Online Safety Index 2023, merupakan bukti nyata sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam membangun ruang digital yang lebih aman.

“Mengamankan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama. Kami tidak akan tinggal diam menghadapi konten-konten berbahaya yang tersembunyi di balik layar digital yang tampak ramah. Regulasi baru ini akan segera diumumkan sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah dalam melindungi masa depan generasi penerus,” tegas Meutya Hafid dalam acara Hari Internet Aman Bersama Google Indonesia di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat.

Ia menambahkan, “Platform digital, meskipun kantor pusatnya berada di luar negeri, harus patuh terhadap regulasi yang kami tetapkan. Kami menghargai kolaborasi dengan Google dan mengajak platform lainnya untuk bersama-sama menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak-anak.”

Upaya pemerintah tidak hanya berfokus pada penertiban konten, tetapi juga mengedukasi masyarakat. Seluruh elemen, mulai dari orang tua, pendidik, hingga pelaku industri teknologi, diharapkan dapat berperan aktif mendukung inisiatif ini. Melalui kerja sama lintas sektor, regulasi baru ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keamanan siber, tetapi juga membentuk budaya digital yang

inklusif dan memberdayakan, sehingga anak-anak dapat menikmati manfaat teknologi dengan aman dan cerdas.

Sebagai ekor berita, Menkomdigi mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyongsong masa depan digital yang lebih baik dengan semangat gotong royong dan inovasi berkelanjutan. Dengan regulasi baru yang akan segera diumumkan, Indonesia menegaskan tekadnya untuk membentengi anak-anak dari segala bentuk ancaman digital, sekaligus mewujudkan ruang digital yang sehat dan produktif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Inspektorat Bombana Audit Pengelolaan Keuangan di 9 Desa Kecamatan Lantari Jaya

Bombana, sultranet.com - Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melalui Inspektur Pembantu Wilayah I bersama tim melakukan audit ketaatan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa di sembilan desa yang ada di Kecamatan Lantari Jaya. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa tahun 2024. (18/2)

Sembilan desa yang menjadi lokasi audit adalah Desa Anugrah, Desa Kalaero, Desa Lombakasih, Desa Langkowala, Desa Lantari, Desa Pasare Apua, Desa Rarongkeu, Desa Watu-Watu, dan Desa Tinabite. Lingkup pemeriksaan meliputi pengelolaan keuangan desa, belanja modal, pemeriksaan fisik pekerjaan, kepatuhan pajak, serta bantuan kepada masyarakat.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menegaskan bahwa pengawasan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.

“Semua kami libatkan dalam pengawasan ini, mulai dari pimpinan, auditor, hingga pegawai Inspektorat. Tujuannya untuk memastikan bahwa proses dan

mekanisme pengawasan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ini juga menjadi atensi bagi kita semua agar tata kelola keuangan desa semakin transparan dan akuntabel,” ujar Ridwan.

Ia menjelaskan bahwa dasar hukum dalam pemeriksaan ini merujuk pada beberapa regulasi, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Inspektur Pembantu Wilayah I, Herianto Gazali, S.STP., M.A.P., menyatakan bahwa pengawasan ini merupakan agenda rutin Inspektorat yang dilakukan setiap tahun dan telah tertuang dalam Keputusan Bupati Bombana Nomor 100.3.3.2-34 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024.

“Kami berharap para objek pemeriksaan (obrik) dapat proaktif dan selalu menyiapkan dokumen yang diminta agar proses pengawasan berjalan lancar. Pengawasan ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi riil pengelolaan keuangan desa serta memberikan arahan bagi desa dalam menjalankan tata kelola yang sesuai dengan regulasi,” jelas Herianto.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Inspektorat tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra pemerintah desa dalam memastikan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien.

“Dengan adanya pengawasan ini, kami ingin membantu pemerintah desa dalam memperbaiki tata kelola anggaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami ingin mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran desa,” tambahnya.

Audit ketaatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemerintah desa terhadap pentingnya pengelolaan anggaran yang sesuai regulasi serta mencegah potensi penyimpangan dalam penggunaan dana desa. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pemeriksaan, Inspektorat akan memberikan rekomendasi perbaikan agar pengelolaan keuangan desa ke depan semakin baik.

Laporan hasil pemeriksaan ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah strategis dalam tata kelola keuangan desa. Selain itu, hasil audit juga akan menjadi referensi dalam peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Jaga Kebersihan Pasar Waemputtang, Babinsa Koramil 03/Poleang Pimpin Pelaksanaan Kerja Bakti

Bombana, Sultranet.com - Personel Koramil 1431-03/Poleang melaksanakan kerja bakti membersihkan Pasar Rakyat Waemputtang di Desa Waemputtang, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat, serta mencegah bau tak sedap akibat penumpukan sampah. Selasa, (18/02)

Kegiatan ini dipimpin oleh Babinsa Koramil 1431-03/Poleang, Sertu Zakkir, dan diikuti oleh beberapa personel Koramil lainnya, yakni Sertu Ikbal, Sertu Nurbais, Serda Haruna, dan Serda Sultan. Selain itu, turut hadir Kepala Dusun 1 Sainuddin, Kepala Dusun 2 Ansar, Kepala Dusun 3 Mustakim, serta sekitar 15 orang warga setempat yang ikut berpartisipasi dalam gotong royong ini.

Kepala Dusun 3, Mustakim, menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini. "Kerja bakti ini sangat penting untuk menjaga kebersihan pasar agar tetap nyaman bagi pedagang dan pembeli. Lingkungan yang bersih juga akan mendukung kesehatan masyarakat," ujarnya.



Sertu Zakkir selaku Babinsa Koramil 1431-03/Poleang menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap lingkungan.

“Kami selalu siap membantu masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan fasilitas umum seperti pasar. Kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antara TNI dan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Danramil 1431-03/Poleang, Lettu Inf Dahlan, menegaskan bahwa kerja bakti ini merupakan bagian dari upaya Koramil dalam mendukung kebersihan lingkungan.

“Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk terus menjaga kebersihan pasar dan lingkungan sekitar secara rutin,” pungkasnya.

Gubernur-Wagub Sultra dan 16 Kepala Daerah Terpilih Bakal

Dilantik Serentak di Istana Negara

Jakarta, SultraNet.com — Persiapan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) terpilih, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua, bersama 16 Bupati/Wali Kota terpilih se-Sultra terus dimatangkan. Upacara pelantikan akan digelar secara serentak di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025 mendatang. (18/02/2025)

Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H melalui Sekretaris Daerah Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, menyampaikan bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian dari agenda nasional berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

“Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan dilakukan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada 20 Februari,” ujar Andap, Selasa (18/2/2025).

Menurut Asrun Lio, rangkaian kegiatan jelang pelantikan sudah berlangsung sejak awal pekan ini, dimulai dengan pemeriksaan kesehatan dan dilanjutkan dengan gladi kotor yang dilaksanakan di kawasan Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

“Selasa pagi ini, para kepala daerah terpilih mengikuti gladi pertama dengan mengenakan pakaian olahraga. Mereka berangkat dari satu hotel yang sama menggunakan tiga bus besar menuju lokasi gladi,” jelasnya.

Dalam gladi tersebut, para peserta berlatih pembentukan pleton, penghormatan, serta baris-berbaris (PBB) sebagai bagian dari prosesi resmi pelantikan. Asrun menegaskan bahwa meski latihan terlihat sederhana, namun dengan banyaknya jumlah kepala daerah yang akan dilantik, pelaksanaannya perlu dipersiapkan secara matang dan terkoordinasi.

Gladi resik dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 19 Februari 2025, sehari sebelum pelantikan utama. Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengikuti program orientasi kepemimpinan di Magelang.

“Orientasi ini menjadi bekal awal bagi kepala daerah untuk memahami dinamika pemerintahan ke depan,” ujar Asrun.

Ia juga menyampaikan harapannya agar seluruh kepala daerah terpilih tetap dalam kondisi sehat dan prima hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.

“Kami berdoa agar para pemimpin daerah, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih serta 16 pasangan Bupati dan Wali Kota se-Sultra, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dapat kembali ke Bumi Anoa tanpa kekurangan apa pun,” pungkasnya.

Berikut daftar 16 pasangan Bupati/Wali Kota dan Wakilnya dari Sultra yang akan dilantik bersama Gubernur-Wakil Gubernur:

- Kabupaten Kolaka: H. Amri, S.STP., M.Si dan H. Husmaluddin
- Kabupaten Konawe: H. Yusran Akbar, S.T dan H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si
- Kabupaten Bombana: Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si
- Kabupaten Buton Utara: Afirudin Mathara, S.H., M.H dan Rahman, S.KM., M.Kes
- Kabupaten Kolaka Timur: Abd. Azis, S.H., M.H dan Yosep Sahaka, S.Pd
- Kabupaten Muna Barat: La Ode Darwin dan Drs. Ali Basa, M.S.
- Kabupaten Konawe Selatan: Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H
- Kabupaten Muna: Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, S.H., M.H
- Kabupaten Buton: Alvin Akawijaya Putra, S.H dan Syarifudin Saafa, S.T
- Kabupaten Buton Selatan: Muhammad Adios, S.Sos dan La Ode Risawal, S.H
- Kabupaten Wakatobi: H. Haliana, S.E dan Dra. Hj. Safia Wualo
- Kabupaten Kolaka Utara: Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H. dan H. Jumarding, S.E.
- Kabupaten Konawe Utara: H. Ikbar, S.H., M.H. dan H. Abu Haera, S.Sos., M.Si
- Kabupaten Konawe Kepulauan: Rifqi Saifullah Razak, S.T dan Muhamad Farid, S.E
- Kota Kendari: dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM dan Sudirman
- Kota Baubau: H. Yusran Fahim, S.E. dan Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc

Dengan pelantikan serentak ini, pemerintah berharap para kepala daerah yang baru dapat langsung tancap gas menjalankan amanah rakyat untuk lima tahun ke depan. Pemerintah pusat menaruh harapan besar kepada para pemimpin daerah agar mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik secara merata, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara.

Pj Gubernur Minta OJK Sultra Baru Lindungi Warga dari Investasi dan Pinjol Ilegal

Kendari, SultraNet.com - Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lebih aktif melindungi masyarakat dari praktik investasi bodong dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang meresahkan. Permintaan itu disampaikan saat menghadiri acara pengukuhan Kepala OJK Provinsi Sultra yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa, 18 Februari 2025.

Dalam kegiatan tersebut, Bismi Maulana Nugraha resmi menjabat sebagai Kepala OJK Provinsi Sultra menggantikan Arjaya Dwi Raya yang telah bertugas sejak 2020. Acara pengukuhan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, doa bersama, pemutaran kaleidoskop kegiatan OJK, dan dilanjutkan dengan sambutan dari pejabat yang hadir.

Andap mengucapkan selamat datang kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar beserta jajaran, serta menyampaikan apresiasi atas dedikasi Arjaya Dwi Raya selama lima tahun terakhir memimpin OJK di wilayah Sultra.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Sultra, kami menyampaikan terima kasih atas pengabdian, dedikasi, dan kontribusi yang telah diberikan. Semoga Bapak Arjaya dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan,” kata Andap dalam sambutannya.

Ia juga menyambut hangat Kepala OJK Sultra yang baru. “Selamat datang di Bumi Anoa. Semoga dapat mengemban amanah dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta sektor jasa keuangan di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Andap menyampaikan lima pesan penting kepada Kepala OJK yang baru. Pertama, OJK diminta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat untuk mengurangi risiko terjebak pada praktik keuangan ilegal, sesuai Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2023.

“Kami ingin masyarakat Sultra terlindungi dari investasi ilegal dan pinjaman daring ilegal. Prinsip kami jelas: *Salus Populi Suprema Lex Esto*, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” tegasnya kepada media usai acara.

Kedua, Andap menekankan pentingnya berbagi informasi antara OJK dan pemerintah daerah agar langkah pengawasan keuangan digital lebih tepat sasaran. Ketiga, ia mengingatkan bahwa sinergi antara OJK, pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar jargon.

Pesan keempat, ia meminta pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan secara intensif untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi riil, termasuk UMKM. “Integritas industri jasa keuangan sangat menentukan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Terakhir, ia menekankan agar literasi keuangan tidak hanya dijangkau di kota, tapi hingga pelosok jazirah Sultra. “Literasi yang merata akan mencegah masyarakat dari jerat keuangan yang menipu,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa OJK kini memiliki mandat tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi, tapi juga harus mampu mengembangkan sektor jasa keuangan. Ini sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi daerah,” ungkap Mahendra.

Ia menambahkan, OJK mendorong pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan

Daerah (TPAKD) sebagai bagian dari strategi inklusi keuangan. Provinsi Sultra, menurutnya, telah menunjukkan komitmen nyata dengan membentuk satu TPAKD di tingkat provinsi dan 17 TPAKD di tingkat kabupaten/kota.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan OJK adalah kunci untuk memperkuat stabilitas keuangan, mendukung UMKM, dan meningkatkan literasi serta inklusi keuangan di seluruh daerah,” katanya.

Pengukuhan Kepala OJK Provinsi Sultra ini juga dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tingkat I Sultra, Sekretaris Daerah dan jajaran pimpinan tinggi Pemprov Sultra, Deputy Komisioner OJK, Kepala OJK Sulselbar, Kepala Perwakilan BI, Plt Kepala BPS, serta pimpinan BUMN dan BUMD di Sultra.

Bombana Tetap Kondusif Pascapilkada, Pj Bupati Edy Suharmanto Apresiasi Satpol PP

Bombana, Sultranet.com - Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, memberikan apresiasi tinggi kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Linmas, dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bombana atas peran aktif mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban pascapemilihan kepala daerah (pilkada) November 2024. Pernyataan itu disampaikannya dalam upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) di halaman Kantor Bupati Bombana, Senin, 17 Februari 2025.

Kondisi Kabupaten Bombana yang tetap aman, damai, dan tenteram setelah pilkada menjadi perhatian utama dalam pidato perpisahan Edy Suharmanto menjelang berakhirnya masa tugasnya sebagai penjabat bupati. Ia menggarisbawahi pentingnya peran Satpol PP bersama Linmas dan Damkar dalam menjaga stabilitas sosial-politik di daerah, khususnya selama masa transisi pascapemilu.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Satpol PP, Linmas, dan Damkar Bombana. Mereka tidak hanya menjaga keamanan secara fisik, tapi juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tetap menjaga ketertiban setelah pilkada. Stabilitas ini adalah hasil kerja keras kita semua,” ujar Edy dalam sambutannya di hadapan ratusan ASN dan pegawai lingkup Pemda Bombana.

Upacara HKN yang berlangsung khidmat itu dihadiri oleh Plh Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli Setda, kepala OPD, serta pegawai dari berbagai unsur termasuk PPPK dan PHTT. Dalam upacara tersebut, Satpol PP, Linmas, dan Damkar turut mengambil peran penting dalam prosesi pengibaran bendera, yang juga sekaligus memperingati Hari Bela Negara.

Edy menegaskan, HKN bukan sekadar seremoni bulanan, melainkan momentum untuk meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN). Ia mengajak seluruh ASN menjadikan momen tersebut sebagai pengingat akan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Peringatan ini bukan hanya rutinitas, tapi refleksi dari semangat kita melayani dan menjaga kepercayaan publik. Stabilitas yang kita rasakan hari ini tidak akan mungkin tercapai tanpa sinergi lintas sektor, dan Satpol PP menjadi ujung tombaknya,” ujarnya.

Selain menyampaikan apresiasi, Edy Suharmanto juga berpamitan secara resmi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Bombana. Setelah lebih dari satu tahun memimpin sebagai pejabat bupati, ia menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama semua pihak dalam mendukung agenda pembangunan selama masa jabatannya.

Dalam pernyataannya, Edy memaparkan sejumlah capaian strategis selama dirinya menjabat. Di antaranya adalah penurunan angka inflasi, penanggulangan stunting secara signifikan, serta pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui program-program lintas sektor yang didorong oleh sinergi pemerintah daerah dan dukungan masyarakat.

“Kita berhasil menurunkan angka inflasi daerah dan menekan stunting lewat intervensi gizi yang tepat sasaran. Selain itu, angka kemiskinan dan pengangguran juga mengalami penurunan berkat program pemberdayaan

masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Ini semua bukan kerja saya sendiri, tapi hasil gotong royong kita semua," jelasnya.

Momen tersebut menjadi ajang refleksi dan penghargaan terhadap seluruh elemen birokrasi, khususnya Satpol PP Bombana, yang telah bekerja tanpa lelah dalam menjaga kondusivitas dan ketertiban umum. Kehadiran mereka di tengah masyarakat bukan hanya sebagai aparat penegak perda, melainkan juga sebagai mitra edukatif yang mengedepankan pendekatan persuasif dalam membangun kesadaran hukum dan kedisiplinan sosial.

Dengan kehadiran berbagai elemen pemerintahan dalam upacara ini, terlihat kuatnya semangat kolaboratif dalam menjaga ritme pelayanan publik dan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana pun menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kestabilan sosial demi keberlanjutan pembangunan di masa mendatang, siapapun pemimpin yang akan melanjutkan estafet pemerintahan.

Pj. Bupati Bombana Edy Suharmanto Pamit, Suasana Haru Warnai Acara Perpisahan

Bombana, sultranet.com - Suasana haru dan penuh kehangatan menyelimuti acara silaturahmi dan perpisahan Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, serta Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Aeni Mutmainnah, S.Pd., MM. Acara yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Bombana ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Plh. Sekretaris Daerah, asisten daerah, staf ahli, kepala OPD, camat, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan. Senin, 17 Februari 2025.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat Bombana atas

dukungan selama masa kepemimpinannya. Ia berharap program-program yang telah dirintis dapat terus berlanjut demi kemajuan daerah.

“Selama satu tahun tiga bulan, kita telah bekerja keras mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bombana. Kita ingin Bombana menjadi yang terbaik di Sulawesi Tenggara. Ada banyak pencapaian yang telah kita raih bersama,” ujar Edy Suharmanto.



Ia juga menekankan bahwa keberhasilan yang diraih merupakan hasil kerja sama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.

“Saya bangga dengan kinerja kita bersama. Banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi dengan kebersamaan dan kerja keras, kita mampu menciptakan perubahan nyata. Saya yakin Bombana memiliki potensi besar untuk terus berkembang,” tambahnya dengan penuh keyakinan.

Sementara itu, Pj. Ketua TP PKK Bombana, Aeni Mutmainnah, S.Pd., MM, juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin selama masa jabatannya. Ia berharap Tim Penggerak PKK dapat terus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

“Terima kasih atas dukungan semua pihak dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga. Saya berharap semangat kebersamaan ini terus berlanjut demi kesejahteraan masyarakat Bombana,” ujarnya.

Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan, dilakukan prosesi pemberian cendera mata dan kenang-kenangan kepada Pj. Bupati dan Pj. Ketua TP PKK. Para tamu undangan tampak memberikan apresiasi dan doa terbaik bagi keduanya yang telah menyelesaikan masa tugas mereka di Bombana.

Dengan berakhirnya masa jabatan Pj. Bupati dan Pj. Ketua TP PKK, masyarakat Bombana berharap kepemimpinan yang baru nantinya dapat melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan daerah. Acara perpisahan ini menjadi momen refleksi atas capaian yang telah diraih serta semangat untuk terus bergerak maju demi Bombana yang lebih baik.

Pamit dari Jabatan, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto Paparkan Capaian

Kendari, sultranet.com - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, memimpin Apel Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Kantor Gubernur Sultra pada Senin (17/2/2025). Apel ini dihadiri oleh seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra.

Dalam kesempatan tersebut, Andap berpamitan seiring berakhirnya masa tugasnya sebagai Pj Gubernur Sultra. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan dilakukan serentak oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

Andap menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan dukungan yang diberikan selama 534 hari masa kepemimpinannya, sejak 5 September 2023 hingga 20 Februari 2025. Ia mengungkapkan apresiasi kepada seluruh ASN yang telah bekerja sama dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Terima kasih, Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah SWT. Waktu berlalu begitu cepat, 534 hari saya menjalankan amanah sebagai Pj Gubernur Sultra. Terima kasih atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin sehingga tugas ini dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Andap.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama masa kepemimpinannya. Andap berharap masyarakat dan ASN dapat memberikan dukungan penuh kepada gubernur terpilih yang akan segera dilantik.

“Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan selama mengemban amanah ini. Mari kita dukung gubernur terpilih agar Sultra semakin maju, sejahtera, dan modern,” harapnya.



Menutup amanatnya, Andap berpesan agar seluruh ASN menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan serta memiliki komitmen moral dan empati yang tinggi.

“Jadilah ASN yang memiliki integritas, karena sebaik-baiknya jabatan adalah yang memberikan manfaat bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat Sultra,” pesannya.

Setelah apel, Andap berpamitan dengan para peserta apel dengan bersalaman. Apel tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, pimpinan tinggi pratama, staf ahli gubernur, asisten sekretaris daerah, inspektur daerah, kepala dinas, kepala badan, dan seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sultra.

Selama masa kepemimpinannya, Andap berhasil mencatat berbagai prestasi dan penghargaan, di antaranya:

1. Transformasi digital dengan penerapan aplikasi Sisumaker untuk sistem surat menyurat berbasis elektronik, serta aplikasi bayar zakat dan qurban.
2. Penataan tenaga honorer di lingkungan Pemprov Sultra, yang menghasilkan alokasi 5.988 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2024.
3. Operasionalisasi Rumah Sakit Jantung Oputa Yi Koo hingga mampu melakukan operasi bedah jantung terbuka dan dalam waktu dekat menangani pembedahan otak.
4. Pengendalian inflasi yang awalnya tertinggi kedua secara nasional, berhasil ditekan hingga masuk peringkat kedua terendah di Indonesia.
5. Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Wakil Presiden RI pada 8 Agustus 2024.
6. Peringkat keempat nasional dalam peningkatan produksi pangan beras pada 23 Oktober 2024.
7. Apresiasi sebagai Top CEO BUMD dan Top BUMD Bintang 4 pada 29 September 2023.
8. Konsolidasi pengadaan aspal Buton dalam katalog elektronik lokal, dengan penghargaan dari LKPP pada 7 November 2023.
9. Provinsi terbaik pertama dalam pertumbuhan industri, penghargaan dari Kementerian Perindustrian pada 11 Desember 2023.
10. Rekor MURI atas penanaman 2,7 juta tanaman hortikultura pada 23 November 2023.
11. Peringkat kedua nasional dalam Indeks Integritas Pendidikan, penghargaan dari KPK pada 9 Juni 2024.
12. Implementasi strategi kebijakan daerah di sektor pariwisata, penghargaan dari Kementerian Pariwisata pada 13 Desember 2024.

13. Predikat “Sangat Baik” dalam Indeks Perencanaan Pembangunan dari Bappenas pada 26 November 2024.
14. Tokoh Pemerintah Inovatif dalam Sultra Award Kendari Pos 2024 pada 12 September 2024.
15. Apresiasi sebagai Tokoh Nasional kategori “Pariwisata dan Pelestarian Budaya” dari Tempo Media Group pada 10 September 2024.
16. Pembangunan 1.183 unit rumah tidak layak huni, dengan 220 unit dalam tahap verifikasi.

Selain itu, Andap juga berhasil membawa Sultra meraih berbagai penghargaan lainnya, termasuk Juara 1 Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 kategori Desa Wisata Berkembang, Sistem Merit Predikat Baik dari Komisi ASN, serta Peringkat III Anugerah Legislasi 2023 dari Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan berbagai capaian tersebut, Andap meninggalkan warisan positif bagi Sultra. Kini, ia berharap kepemimpinan yang baru dapat terus melanjutkan pembangunan dan membawa Sultra ke arah yang lebih baik.